

## Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Berbasis ISO 37001:2016 Pada Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di PTPN XI

Nurleila Jum'ati<sup>1</sup>, Siti Wulandari<sup>2</sup>, Rezki Binuntsa Mutmaina<sup>3</sup>, Yani Susanti<sup>4</sup>,  
Surya Ani Devita<sup>5\*</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi Penulis: [nurleila@uwp.ac.id](mailto:nurleila@uwp.ac.id)

**Abstract.** Corruption in Indonesia is very high and widespread in both state-owned and private companies. The government has made various efforts to prevent acts of corruption that can hinder the growth and continuity of national development. One of the efforts made is through the implementation of an anti-bribery management system based on ISO 37001:2016. The purpose of the internship is to find out the implementation of the anti-bribery management system at the PTPN XI head office. This study uses a qualitative approach, data collection techniques through observation, FGD, and documentation using interactive data analysis techniques (data reduction, data presentation, and concluding). SMAP's external audit results show that there are 3 minor findings related to the scope of application of the anti-bribery management system which is currently limited to the head office, while for existing business units that have not implemented an anti-bribery management system based on ISO 37001:2016, the decree is not implemented. the Whistle Blowing System (WBS) management team where the complaint center is only managed by one person which will allow for manipulation of complaint data and the bribery risk identification process and not all subsections are identified for bribery risk, risk assessment is only carried out based on the business process of the work unit in general and less specific PTPN XI has implemented an anti-bribery management system in the head office environment as evidenced by the SMAP audit process which is carried out consistently every year to realize good corporate governance.

**Keywords:** ISO 37001:2016, Anti-Bribery Management System, Internship, PTPN XI, Stated Owned Enterprise.

**Abstrak.** Tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia sangat tinggi dan meluas baik di perusahaan milik negara maupun swasta. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan tindakan korupsi yang dapat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan sistem manajemen anti penyuapan berbasis ISO 37001:2016. Tujuan kegiatan magang adalah untuk mengetahui penerapan sistem manajemen anti penyuapan pada kantor pusat PTPN XI. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, FGD dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data interaktif (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Hasil audit eksternal SMAP menunjukkan bahwa terdapat 3 temuan minor yaitu terkait ruang lingkup penerapan sistem manajemen anti penyuapan saat ini hanya terbatas pada kantor pusat saja, sedangkan untuk unit unit usaha yang ada belum menerapkan sistem manajemen anti penyuapan berbasis ISO 37001:2016, tidak terlaksananya SK tim pengelola Whistle Blowing System (WBS) dimana pusat pengaduan hanya dikelola oleh satu orang saja yang akan memungkinkan terjadinya tindakan manipulasi data pengaduan dan proses identifikasi risiko penyuapan dan tidak semua subbagian dilakukan identifikasi risiko penyuapan, penilaian risiko hanya dilakukan berdasarkan proses bisnis unit kerja secara general dan kurang spesifik PTPN XI telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan di lingkungan kantor pusat dibuktikan dengan adanya proses audit SMAP yang dilakukan setiap tahun secara konsisten untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

**Kata Kunci :** ISO 37001:2016, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Magang, PTPN XI, BUMN.

### 1. PENDAHULUAN

Tindakan korupsi di Indonesia sudah meluas dan terjadi di mana-mana, tindakan ini harus segera diberantas karena dampak korupsi sangat besar dan meluas, selain merugikan keuangan negara korupsi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional (Zenno Januarsyah dkk., 2020). Korupsi terjadi baik di perusahaan milik negara maupun

swasta. Beberapa kasus korupsi terjadi di ruang lingkup Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting dalam perekonomian nasional Indonesia yang memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia sebagai perwujudan dari bentuk demokrasi ekonomi yang akan terus berkembang secara bertahap dan berkelanjutan (Isharyanto dkk., 2021). Berdasarkan data dari KPK menunjukkan tren kenaikan kasus korupsi BUMN/BUMD yang terjadi sepanjang tahun 2004-2019 sebanyak 86 kasus dan paling banyak terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 17 kasus (Aslam, 2021).

Penegakan undang-undang anti-penyuapan telah meningkat di banyak negara di seluruh dunia, termasuk pengenaan denda yang signifikan bagi organisasi dan hukuman penjara untuk eksekutif perusahaan yang melanggar (Veselovská, Závadský, dan Závadská, 2020). Fungsi kontrol perusahaan (yaitu, audit internal atau fungsi sistem pengendalian internal) memainkan peran utama dalam pencegahan dan transparansi atas tindakan penyuapan (Cardoni, Kiseleva, dan De Luca, 2020). Korupsi yang terjadi selama ini dianggap hanya terjadi di sektor pelayanan publik dan melibatkan aparatur negara, ternyata juga terjadi di dunia usaha dan melibatkan aktor dari perorangan maupun korporasi (Zenno Januarsyah dkk., 2020). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mencegah tindakan penyuapan adalah melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016.

ISO 37001:2016 diterbitkan pada Oktober 2016 yang merupakan standard anti penyuapan pertama yang diakui secara internasional dan dikembangkan oleh 59 negara yang berpartisipasi dan mengamati dalam keanggotaan ISO (Peltier-Rivest 2021). ISO 37001 diterbitkan dengan tujuan membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menangani suap menuju budaya bisnis yang beretika lebih baik serta membantu organisasi, untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan program kepatuhan anti penyuapan (Haron dkk. 2018). ISO 37001 dapat diterapkan untuk organisasi kecil, menengah, dan besar di semua sektor, termasuk sektor publik, swasta, dan nirlaba (ISO 2016). Risiko penyuapan yang dihadapi organisasi sangat bervariasi sesuai dengan faktor faktor seperti, kompleksitas kegiatan organisasi, skala, sifat, lokasi dan sektor dimana organisasi tersebut beroperasi, serta ukuran organisasi (ISO 2016). ISO 37001 menetapkan penerapan prosedur, kebijakan, dan kontrol oleh organisasi yang wajar dan proporsional sesuai dengan risiko penyuapan yang dihadapi organisasi (Veselovská, Závadský, dan Závadská, 2020).

PT Perkebunan Nusantara XI merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan berbasis ISO 37001:2016 dan sudah melakukan sertifikasi pada tahun 2020. PTPN XI merupakan salah satu anggota perusahaan

PT Perkebunan Nusantara *Group*. PTPN XI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang agrobisnis dan agroindustri berbasis tebu. Hasil olahan PTPN XI meliputi gula sebagai komoditi utama serta alkohol, spiritus, dan karung plastik. PTPN XI menerapkan sistem manajemen anti penyuapan di lingkungan kantor pusat untuk mengantisipasi terjadinya tindakan penyuapan pada setiap proses bisnis perusahaan yang dapat merugikan perusahaan. Penerapan sistem manajemen anti penyuapan pada PTPN XI menjadi acuan atau panduan yang harus dipatuhi oleh seluruh bagian agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari tindakan penyuapan. Sistem manajemen anti penyuapan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mendukung penerapan tata kelola yang baik bagi perusahaan.

Tujuan dilaksanakannya PMMB (Program Magang Mahasiswa Bersertifikat) di PTPN XI adalah untuk menambah pemahaman teori dan praktik mengenai implementasi sistem manajemen anti penyuapan berbasis ISO 37001:2016 dalam upaya perusahaan untuk mengidentifikasi risiko dan melakukan mitigasi atas potensi penyuapan yang terjadi pada setiap proses bisnis perusahaan.

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82)

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Program ini dilaksanakan di PT Perkebunan Nusantara XI Jl. Merak No.1, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60175. Waktu pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat selama 6 bulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data antara lain:

### **1. Observasi**

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap data atau informasi yang harus diamati dan ditata secara benar dan lengkap dalam suatu gejala pada objek penelitian (Astutik & Rusimamto, 2016). Observasi dalam penelitian yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di PT. Perkebunan Nusantara XI. Data yang diperoleh melalui proses observasi berupa deskripsi mengenai kegiatan yang diteliti. Dalam proses observasi peneliti melihat dan mendengarkan kegiatan yang diamati pada objek penelitian kemudian menarik kesimpulan atas apa yang diamati. Adanya observasi peneliti dapat mengetahui bagaimana implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada PT Perkebunan Nusantara XI.

## 2. Focus Group Discussion (FGD)

Selain melakukan observasi penulis juga melakukan *FGD (Focus Group Discussion)*. FGD merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi kualitatif dengan cara sistematis mengenai suatu masalah yang dilakukan melalui diskusi kelompok (Waluyati, 2020). Waluyati (2020) menambahkan bahwa metode FGD dapat memberikan data yang lebih mendalam, informatif, dan bernilai, kemudian dari segi kepraktisan model ini hemat biaya, dan dapat mengumpulkan data lebih banyak dengan waktu yang singkat. Melalui FGD dapat diketahui alasan, motivasi, argumentasi atau dasar dari pendapat seseorang atau kelompok. Informan yang menjadi anggota FGD adalah tenaga ahli (konsultan), tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan, dan perwakilan dari masing-masing bagian yang ada pada kantor pusat PT Perkebunan Nusantara XI.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2018). Penulis melakukan kajian terhadap dokumen terkait penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang ada di kantor pusat PTPN XI seperti SOP, pedoman SMAP, tabel register risiko penyuapan, dan lain lain. Dari dokumen tersebut penulis dapat menangkap informasi mengenai subjek yang diteliti

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu :

- a. Reduksi data yaitu penulis melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstrakan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicata selama proses penggalian data di lapangan (Nugrahani, 2014). Pada proses reduksi penulis membuat catatan ringkas mengenai data yang telah diperoleh di lapangan sesuai dengan batasan yang diteliti.
- b. Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan (Nugrahani, 2014). Penulis melakukan penyajian data berdasarkan hasil reduksi dalam bentuk narasi, tabel, dan lain lain, melalui penyajian data tersebut penulis dapat merumuskan hasil temuan.
- c. Penarikan kesimpulan yaitu kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data (Nugrahani, 2014). Pada tahap ini penulis melakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil analisis data yang telah dilakukan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mengantisipasi tindakan penyuapan yang terjadi di lingkungan kantor pusat PT Perkebunan Nusantara XI, perusahaan melakukan sertifikasi mengenai penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai dengan standar internasional ISO 37001:2016. PT Perkebunan Nusantara XI pertama kali melakukan sertifikasi ISO 37001:2016 pada tahun 2020 oleh lembaga sertifikasi Tuv Nord dengan masa berlaku sertifikat selama 3 tahun. Setiap satu tahun sekali PT Perkebunan Nusantara XI harus melakukan audit atau resertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi untuk mempertahankan sertifikasi tersebut. Adapun proses kegiatan audit eksternal yang dilakukan oleh PTPN XI dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Proses Audit Sistem Manajemen Anti Penyuapan

No	Proses	Keterangan
1	Peninjauan Dokumen	Dokumen terkait seperti pedoman SMAP, SOP, dan lain lain
2	Penilaian risiko penyuapan	Sesuai dengan tabel register risiko yang digunakan
3	Sosialisasi audit internal	Pemaparan mengenai sistem manajemen anti penyuapan kepada seluruh bagian
4	Pelatihan audit internal	Pemaparan mengenai praktik audit internal kepada seluruh bagian
5	Audit internal	Audit sistem manajemen anti penyuapan oleh pihak internal perusahaan
6	Monitoring hasil temuan	Monitoring hasil tindak lanjut temuan pada audit internal
7	Rapat tinjauan manajemen	Rapat dewan pengarah dan manajemen puncak bersama dengan tim FKAP
8	Audit eksternal	Audit sistem manajemen anti penyuapan oleh pihak eksternal perusahaan
9	Monitoring hasil temuan	Monitoring hasil tindak lanjut temuan pada audit eksternal

Adapun penjelasan mengenai proses audit eksternal yang berjalan di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara XI adalah sebagai berikut :

1. Melakukan peninjauan kembali relevansi dokumen pedoman SMAP



Gambar 1. Peninjauan dokumen bersama dengan konsultan

Peninjauan kembali relevansi dokumen pedoman SMAP dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kantor pusat PTPN

XI. Adapun pedoman SMAP yang ditinjau adalah mengenai identifikasi isu internal dan eksternal, penentuan harapan pihak yang berkepentingan, penentuan sasaran SMAP, monitoring sasaran SMAP, dan lain-lain.

## 2. Melakukan penilaian risiko penyuuapan

Adapun proses penilaian risiko penyuuapan yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara XI adalah sebagai berikut :

- a. Seluruh bagian melakukan identifikasi risiko dan tindakan pengendalian penyuuapan yang mungkin terjadi pada proses bisnis masing-masing bagian
- b. Tindakan pengendalian yang sudah dilakukan harus disertai bukti atau dokumen pendukung
- c. Melakukan penilaian risiko sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan
- d. Apabila nilai risiko diatas rendah maka diperlukan rencana penanganan risiko tambahan
- e. Apabila nilai risiko rendah maka tidak diperlukan rencana penanganan risiko tambahan.

## 3. Sosialisasi dan Pelatihan Audit Internal



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan audit internal

Sosialisasi dan pelatihan audit internal dilakukan oleh seluruh bagian sebelum melakukan audit internal untuk memberikan teori dan praktik terkait dengan sistem manajemen anti penyuuapan sesuai dengan standar ISO 37001:2016. Adapun materi yang diberikan adalah pemahaman mengenai tindakan penyuuapan, gratifikasi, korupsi dan pedoman SMAP ISO 37001:2016 serta pemaparan praktik audit internal seperti cara melakukan pengisian form hasil temuan audit, dan hal lain yang harus dilakukan dalam proses audit internal.

## 4. Audit internal

Audit internal merupakan proses audit yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan yang dilakukan sebelum audit eksternal berlangsung. Audit internal dilaksanakan untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuuapan (SMAP) pada lingkungan kantor pusat PT Perkebunan Nusantara XI. Syarat yang harus dipenuhi bagi auditor dan *auditee* pada saat pelaksanaan audit internal adalah paham standar, proses bisnis atau kerja

bagian yang diaudit, dan metode audit. Adapun proses audit internal yang penulis amati di lingkungan kantor pusat PT Perkebunan Nusantara XI adalah sebagai berikut:

- a. Auditor melakukan audit sesuai dengan arahan atau daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya sebagai acuan dalam melakukan audit internal
  - b. Apabila ditemukan adanya temuan auditor melakukan pencatatan hasil temuan pada form laporan temuan sesuai dengan kategori, adapun kategori temuan dibedakan menjadi 3 yaitu :
    - i. Mayor yaitu temuan dalam kategori besar atau keseluruhan dapat memungkinkan dicabutnya sertifikat
    - ii. Minor yaitu temuan berupa ketidaksesuaian atau hambatan salah satu sistem, temuan ini harus diselesaikan dengan kurun waktu satu sampai dua minggu setelah tanggal audit
    - iii. Observasi yaitu berupa saran dan perbaikan yang diberikan oleh auditor kepada *auditee*, temuan ini boleh untuk tidak dijalankan karena hanya sebagai bahan perbaikan sebelum audit di tahun berikutnya
  - c. Apabila ditemukan adanya temuan auditor melakukan pencatatan terkait penyebab adanya temuan, tindakan perbaikan dan pencegahan, serta rencana tindakan perbaikan dan pencegahan pada form laporan temuan. Pencatatan hasil temuan audit dilakukan berdasarkan PLOR yaitu *Problem* atau masalah yang menjadi ketidaksesuaian, Lokasi yaitu lokasi ditemukannya temuan, *Objective* yaitu bukti adanya ketidaksesuaian, *Reference* yaitu acuan, dasar, dan standar yang digunakan.
5. Melakukan monitoring hasil temuan audit internal
- Setelah melakukan audit internal dan mengidentifikasi temuan-temuan yang ada, proses selanjutnya adalah melakukan monitoring terhadap temuan yang ada untuk memastikan bahwa temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh bagian terkait. Hasil temuan audit internal harus segera ditindaklanjuti sebelum pelaksanaan audit eksternal oleh lembaga sertifikasi. Untuk mempermudah proses monitoring perlu adanya log status mengenai rencana tindakan perbaikan dan pencegahan pada setiap temuan audit internal yang teridentifikasi. Dari log status tersebut dapat diketahui secara detail progres tindak lanjut temuan audit.
6. Rapat Tinjauan Manajemen
- Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen anti penyuapan organisasi, pada rentang waktu terencana, untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifan (ISO, 2016). Rapat Tinjauan manajemen dilakukan untuk mengetahui

pencapaian sasaran SMAP tingkat manajerial (dewan pengarah dan manajemen puncak).

Dalam rapat tinjauan manajemen yang menjadi agenda pembahasan adalah:

- a. Peninjauan kembali relevansi dokumen pendukung penerapan SMAP
- b. Peninjauan kembali hasil temuan audit internal yang dilakukan sebelumnya

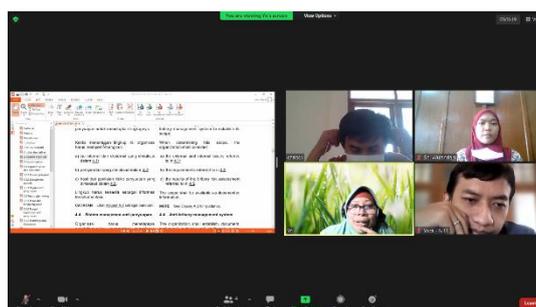
## 7. Audit Eksternal



Gambar 3. Proses audit eksternal dilakukan secara *online*

Audit eksternal dilakukan oleh lembaga sertifikasi (TUV Rheinland) sebagai auditor secara *online*, audit berlangsung selama 3 hari. Dalam audit tersebut terdapat 3 temuan minor (ketidaksesuaian) terkait dengan ruang lingkup penerapan sistem manajemen anti penyusunan, pengelolaan *whistleblowing system*, dan identifikasi risiko penyusunan pada semua subbagian kantor pusat PT Perkebunan Nusantara XI serta 4 temuan observasi (saran dan perbaikan). *Auditee* diberikan jangka waktu 4 minggu oleh auditor untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

## 8. Monitoring hasil temuan audit eksternal



Gambar 4. Proses monitoring hasil temuan audit eksternal

Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa bagian yang bersangkutan sudah melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan atas temuan yang teridentifikasi pada saat proses audit eksternal.

Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan keputusan pembelian yang tepat

(Kristiawati Indriana et.al. 2019 : 28) Kerja sama antara pemerintah, industri, lembaga penelitian dan masyarakat sipil dalam merancang menerapkan, Komitmen dan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan upaya - upaya tersebut. (Gazali Salim et al. 2024 : 63) Saat mengumpulkan sumber data, peneliti mengumpulkan sumber data berupa data mentah. Metode survei adalah metode pengumpulan data primer dengan menggunakan pertanyaan tertulis( Kumala Dewi, Indri et all, 2022 : 29).

#### **4. KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses audit sistem manajemen anti penyuapan terdiri dari peninjauan dokumen, penilaian risiko penyuapan, sosialisasi dan pelatihan audit internal, monitoring, rapat tinjauan manajemen, audit eksternal dan monitoring hasil temuan audit eksternal. Hasil temuan audit eksternal menunjukkan bahwa PTPN XI masih memerlukan beberapa perbaikan pada proses pelaksanaan sistem manajemen anti penyuapan, diantaranya adalah:

- a. Ruang lingkup penerapan sistem manajemen anti penyuapan saat ini hanya terbatas pada kantor pusat saja, sedangkan untuk unit unit usaha yang ada belum menerapkan sistem manajemen anti penyuapan berbasis ISO 37001:2016.
- b. Tidak terlaksananya SK tim pengelola *Whistle Blowing System (WBS)* dimana pusat pengaduan hanya dikelola oleh satu orang saja yang akan memungkinkan terjadinya tindakan manipulasi data pengaduan.
- c. Tidak semua subbagian dilakukan identifikasi risiko penyuapan, penilaian risiko hanya dilakukan berdasarkan proses bisnis unit kerja secara general dan kurang spesifik.

Penulis berharap dengan adanya penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016 PT Perkebunan Nusantara XI dapat membangun, mengimplementasikan, dan terus meningkatkan program kepatuhan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aslam, N. (2021). Pencegahan korupsi di sektor BUMN dalam perspektif pelayanan publik di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 359–372. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.818>
- Astutik, M., & Rusimanto, P. W. (2016). Pengembangan media pembelajaran multimedia interaktif berbantuan software Lectora Inspire untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran teknik listrik di SMK Negeri 2 Surabaya. *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro*, 5(1), 107–114.

- Cardoni, A., Kiseleva, E., & De Luca, F. (2020). Continuous auditing and data mining for strategic risk control and anticorruption: Creating 'fair' value in the digital age. *Business Strategy and the Environment*. <https://doi.org/10.1002/bse.2650>
- Dewi, I. K., et al. (2022). Peningkatan kinerja UMKM melalui pengelolaan keuangan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, UNTAG Surabaya*, 23–36.
- Gazali, S., et al. (2024). Ikan Nomei, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (pp. 1–98).
- Haron, H., Ismail, I., Ibrahim, D. N., Darun, M. R., Zamli, K. Z., Abdullah, A., & Gui, A. (2018). The development of anti bribery management system: A preliminary study. In *2018 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech)* (pp. xx–xx). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICIMTech.2018.8528130>
- International Organization for Standardization (ISO). (2016). *Sistem manajemen anti penyuapan – Persyaratan dengan panduan penggunaan (ISO 37001)*.
- Isharyanto, Husodo, J. A., & Madalina, M. (2021). The legal risk to sustainable role of state-owned enterprises management in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 724(1), 012090. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/724/1/012090>
- Januarsyah, M. P. Z., Astawa, I. G. P., Atmasasmita, R., & Gultom, E. (2020). The idea of implementing a deferred prosecution agreement with the anti-bribery management system in corruption crime management by corporations in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1379–1384. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.158>
- Kristiawati, et al. (2019). Citra merek, persepsi harga, dan nilai pelanggan terhadap keputusan pembelian pada Mini Market Indomaret Lontar Surabaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen (JMM 17)*, 6(2), 27–36.
- Nugrahani, F. (2014). Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT>
- Peltier-Rivest, D. (2021). Corruption at Rolls-Royce: Can it happen again? *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2021-0060>
- Sholeh, A. A., et al. (2024). Kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya. *Journal of Management and Creative Business*, 2(1), 82–96.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Alfabeta.
- Veselovská, L., Závadský, J., & Závadská, Z. (2020). Mitigating bribery risks to strengthen the corporate social responsibility in accordance with the ISO 37001. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(6), 2943–2955. <https://doi.org/10.1002/csr.1909>
- Waluyati, M. (2020). Penerapan focus group discussion (FGD) untuk meningkatkan kemampuan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. *Jurnal Edutech Undiksha*, 8(1), 80. <https://doi.org/10.23887/jeu.v8i1.27089>